

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi yang semakin pesat, mengakibatkan berbagai persaingan kehidupan semakin meningkat. Dunia bisnis yang semakin berkembang, merupakan bentuk nyata kompetisi persaingan. Mencoba memberikan nilai plus terhadap pihak berkepentingan untuk mempertahankan kepercayaan. Perusahaan dituntut menyesuaikan diri dalam strategi yang mumpuni untuk tetap bisa bertahan diri dan mencapai prestasi. Pencapaian tersebut dapat dilihat dari kinerja organisasi. Keterbukaan informasi kinerja perusahaan, relevan, dan mudah dipahami terhadap pihak berkepentingan dapat menjaga relasi baik. Pihak yang berhubungan semacam investor, kreditor, serta pengguna informasi lain bisa memperhitungkan kinerja perusahaan lewat informasi data *financial report* maupun laporan tahunan yang disajikan. Menurut Novita (2019), *annual report* bukan cuma menyajikan informasi komponen *financial* saja, juga komponen non *financial* turut dipaparkan. Jendela informasi *financial report* perusahaan dikatakan memadai terdasar tingkat pengungkapan yang perusahaan nyatakan di laporan keuangan. Maka dengan begitu, informasi yang cukup, kredibel, dan transparan digunakan sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan untuk mengantisipasi risiko yang bisa terjadi.

Dalam menjalankan rutinitas operasinya, setiap perusahaan pasti akan dihadapkan kondisi ketidakpastian yang tak terduga, baik dari dalam maupun

luar perusahaan. Menurut Taures (2011), situasi ketidakpastian mengenai dampak yang akan terjadi, dinamakan risiko. Ketidakpastian ini baik menguntungkan maupun merugikan. Jika merugikan, menyebabkan tidak tercapainya tujuan organisasi. Maka, kegagalan inilah munculnya rasa *distrust* (ketidakpercayaan) oleh publik pada kinerja perusahaan. Bahkan, risiko buruknya, *distrust* mengakibatkan kegiatan bisnis berhenti. Risiko bagian dari kehidupan kerja individual maupun organisasi. Mengutip pernyataan Tandelilin (2010) “ *High Risk High Return* “ artinya risiko yang dihadapi perusahaan jika besar, semakin pula besar hasil yang didapat. Seperti yang dikatakan Sanjaya & Linawati (2015), bahwa lingkungan internal dan eksternal yang berkembang pesat, dapat menyebabkan semakin kompleks risiko. Berbagai macam perusahaan menghadapi risiko, diantaranya risiko eksternal, *financial*, operasional strategis, dan risiko lain. Menurut *Asia Risk Report*, dipaparkan bahwa Indonesia memperhatikan lima risiko yang terdiri hubungan industrial, kekuatan dan pergantian sumber daya manusia, ketidakpastian politik, keadaan ekonomi, dan perubahan peraturan. Sejatinya risiko tidak dapat dihindari dan dihapuskan, namun dapat diminimalkan agar tidak berkepanjangan.

Salah satu skandal kasus terbesar di Indonesia yang cukup mengejutkan di tahun 2019, yakni industri keuangan nasional perusahaan Jiwasraya. Perusahaan plat merah ini merupakan perusahaan BUMN terbesar bidang asuransi. Polemik terjadi ketika PT Asuransi Jiwasraya mengalami masalah pada produk unggulan salah satunya JS *saving plan*. Produk ini ialah produk asuransi jiwa dan penawaran investasi lewat perbankan. Untuk produk lain risiko

akan ditanggung pemegang polis, namun ini risiko sepenuhnya ditanggung perusahaan asuransi. Menurut ketua BPK Agung Firman, hasil dana investasi itulah diinvestasikan di instrumen saham dan reksadana yang kualitasnya rendah, atau terkenal dengan saham gorengan, sehingga mengakibatkan *negative spread*. Hingga berujung gagal bayar akibat tekanan likuiditas (CNN Indonesia). Berdasarkan kasus tersebut, *corporate governance* tidak berjalan baik serta terlihat kelemahan manajemen risiko.

Menurut data *Indonesian Institute for Corporate Directorship* (IICD) tahun 2017, terjadi peningkatan implementasi *corporate governance* perusahaan di Indonesia. Terlihat dari CG score semakin baik dari tahun 2012 dalam persentase 43,29% dan semakin baik pada 2016 sebesar 67,99%. Selain hal tersebut, namun menurut data *Asian Corporate Governance Association* (ACGA) yang terbit setiap dua tahun sekali, posisi Indonesia selama tahun 2014-2018 menempati peringkat paling bawah dalam tata kelola perusahaan diantara deretan negara Asia Pasifik.

Tabel 1.1
Corporate Governance Score

Negara	Tahun		
	2014	2016	2018
Australia	-	78	71
Hongkong	64	67	60
Singapore	65	65	59
Malaysia	60	63	58
Taiwan	56	60	56
Thailand	58	58	55
India	58	56	54

Japan	54	55	54
Korea	49	52	46
China	45	43	41
Philippines	40	38	37
Indonesia	39	36	34

Sumber : diolah dari ACGA

Dari data tersebut menunjukkan bahwa tingkat persentase tata kelola perusahaan negara Indonesia masih rendah atau bisa dikatakan buruk dari negara-negara Asean lain. Untuk menaikkan *corporate governance* dapat ditingkatkan dengan memperhatikan peran manajemen risiko. Pentingnya manajemen risiko tidak terlepas dari tanggungjawab seorang manajemen. Karena berkaitan dengan perannya manajemen dalam membantu mengimplementasikan bagaimana kebijakan dan strategi organisasi.

Istilah manajemen risiko sebenarnya sudah berkembang di kalangan pembisnis tanah air sejak 15 tahun yang lalu (Makdoerah, 2011). Dalam perspektif tradisional, manajemen risiko merupakan sistem yang mengelola risiko secara terpisah. Maksudnya, segala informasi yang ada dalam departemen tersebut, hanya orang-orang yang berada di departemen tersebutlah yang tau. Tidak akan memberi informasi kepada departemen lain, walaupun sama-sama dalam satu perusahaan (Novita, 2019). Melihat dari hal tersebut yang dirasa kurang efektif, tentunya perusahaan semakin lama semakin berbenah, agar manajemen risiko yang diterapkan dalam organisasinya memiliki kualitas yang mumpuni. Bentuk pembenahan kualitas manajemen risiko melalui penerapan manajemen risiko terintegrasi, dikenal dengan sebutan *Enterprise Risk Management* (ERM). Menurut Paape & Spekle (2012), ERM berasal dari

pendekatan holistik yang mengarah pada penerapan komprehensif, maksudnya dalam hal ini proses mengidentifikasi, menilai, dan mengintegrasikan beragam risiko menggunakan teknik dan alat terpadu. Dengan demikian, adanya koordinasi yang melibatkan seluruh unit operasi yang ada dalam suatu organisasi dari aktivitas manajemen risiko. Penerapan ERM secara efektif akan memperoleh keuntungan jangka panjang dan lebih kompetitif bagi perusahaan (Saptiti, 2013). Hal ini sesuai *signalling theory*, oleh perusahaan kepada pihak eksternal dalam hal pengungkapan ERM dapat menimbulkan *signal* positif maupun negatif bagi seorang investor melakukan suatu investasi.

Implementasi ERM tidak terlepas dari tata kelola perusahaan. Ada peran banyak pihak, salah satunya dewan komisaris independen. Kedudukan dewan komisaris independen dalam perusahaan ialah anggota yang bukan tergabung sebagai dewan direksi, pemegang saham mayoritas, dewan komisaris lain, serta perusahaan yang berbentuk hubungan kekeluargaan maupun bisnis (Limantauw, 2012). Perannya penting untuk dapat mengamati, memahami risiko yang terjadi dan memiliki inovasi teruntuk mencegah risiko. Posisinya tidak terkait dengan pengaruh berbagai pihak merupakan hal yang diharapkan untuk bisa bertindak secara objektif. Hal ini merujuk pada penelitian Chen & Lin (2016) dengan berorientasi pada latar belakang pendidikan bidang keuangan bahwa pengawasan pada laporan keuangan akan lebih objektif dan ketat, jika jumlah dewan komisaris independen semakin banyak. Selain itu, dewan komisaris independen dapat bertindak sebagai pihak yang berwenang memberikan rekomendasi kepada manajer melakukan pengungkapan ERM. Berdasarkan

stakeholder theory, sebagai wujud nyata perusahaan memberikan kejelasan sebenarnya. Penelitian yang turut mengkaji diantaranya Tuti (2015), Rismawati (2019), Sari et al (2019) bahwa berpengaruh terhadap pengungkapan ERM. Tetapi, penelitian ini berbeda yang dilakukan Riyadi (2018), Giarti (2019) keberadaan variabel ini tidak menunjukkan pengaruh pada pengungkapan ERM.

Tanggung jawab dewan komisaris independen begitu besar, bisa pendelegasian kepada komite pengawas manajemen yang dalam hal ini bernama komite manajemen risiko untuk meringankan bebannya dalam tugas pengawasan risiko. Diharapkannya komite ini dapat mengatur proses manajemen risiko sesuai panduan dan kebijakan yang dirumuskan (Krus & Orowitz, 2009). Perusahaan yang punya komite manajemen risiko, lebih fokus pada pengimplementasian ERM. Bagi perusahaan perbankan, adanya komite manajemen risiko merupakan kewajiban. Hal ini oleh pemerintah telah diatur pada peraturan BI No.8/4/PBI/2006 mengenai GCG ditujukan bagi bank umum. Di Indonesia, jika dalam perusahaan perbankan regulasi secara ketat, beda lagi pada perusahaan lain masih bersifat *voluntary* (sukarela). Namun, tidak menutup kemungkinan perusahaan diluar perbankan juga melibatkan komite manajemen risiko, mengingat perlu pemahaman tentang struktur dan operasi pengelolaan manajemen risiko (Utami, 2015). Terdasar *signalling theory* bahwa *signal* yang diberikan perusahaan kepada pihak eksternal sangat bermanfaat. Penelitian Putri (2013), Nurcahyani (2018), Riyadi (2018) menyatakan bahwa adanya pengaruh terhadap ERM. Namun, tidak didukung penelitian oleh Kinasih (2016), Giarti (2019) bahwa komite manajemen risiko perusahaan tidak mempengaruhi.

Karakteristik perusahaan seperti *leverage* juga turut dikaji dalam penelitian ini. Munculnya *leverage* dalam perusahaan digunakan untuk menunjang aktivitas operasional perusahaan, baik untuk inovasi produk baru, mengoptimalkan aset, mengurangi ketergantungan bahan baku hasil impor, dsb. Kemampuan perusahaan ditunjukkan dari berapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan atas struktur modal yang dimiliki. Menurut Paramasivan & Subramanian (2009), perusahaan yang menunjukkan *leverage* tinggi, biaya *agency* pun juga turut tinggi, mengakibatkan tingginya risiko keuangan dan *going concern* perusahaan. Sebaliknya karakteristik perusahaan yang *leverage* rendah, artinya dalam pembiayaan pengelolaan asetnya menggunakan modal sendiri. Maka, para pihak yang berkepentingan di dalamnya memaksa perusahaan untuk diungkapkannya informasi ERM lebih luas. *Stakeholder theory* dipilih sebagai dasar pengungkapan informasi. Perusahaan harus mampu mempertimbangkan kepentingan seluruh *stakeholder*, bukan hanya kepentingan *shareholder* saja (Abid et al., 2014). Dalam penelitian Aziz (2016), Frianty (2016), Saskara & Budiasih (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh terhadap ERM. Tetapi, berbeda dengan yang dilakukan oleh Gunawan & Zakiyah (2017), Rifki (2019) tidak menunjukkan adanya pengaruh.

Karakteristik lain yang akan ditambahkan masuk penelitian ini yaitu profitabilitas. Profitabilitas ialah bermacam kelompok rasio yang menampilkan campuran pengaruh likuiditas, manajemen aset, serta pinjaman pada hasil pembedahan operasi (Brigham & Houston, 2010:146). Profitabilitas jadi salah satu dasar penentuan tingkatan kompensasi yang diberikan owner industri

kepada manajer. Sehingga, kala tingkatan profitabilitas besar, manajer diprediksi cenderung hendak melaksanakan pengungkapan agar dinilai kinerja pengelolaan industri yang memuaskan. Berkaitan *signalling theory*, tingkat profitabilitas tinggi cenderung mengungkapkan manajemen risiko. Karena kenaikan profitabilitas adalah *good news* dan menunjukkan baiknya pengelolaan risiko keuangan, inilah akan dimanfaatkan manajer lebih banyak mengungkapkan informasi agar investor semakin percaya (Riyadi, 2018). Dengan begitu seorang investor akan merespon *signal* positif tersebut. Terdasar penelitian yang diteliti Kumalasari et al (2014), Aziz (2016), Saskara & Budiasih (2018) profitabilitas berpengaruh terhadap ERM. Namun bertentangan dengan penelitian yang dilakukan Frianty (2016), (Wicaksono & Adiwibowo, 2017).

Perusahaan dengan ukuran besar, cenderung mengimplementasikan tata kelola yang baik dibandingkan perusahaan kecil. Ini karena perusahaan besar menghadapi risiko cukup tinggi, diantaranya risiko informasi, *financial*, operasional, regulasi, dan reputasi (KPMG). Penilaian ukuran perusahaan berdasarkan besar kecilnya aset perusahaan. Menurut Tahir & Razali (2011), ukuran perusahaan yang semakin besar, respon positif investor semakin pula besar dalam menanamkan modalnya, ini menunjukkan kinerja dan perkembangan perusahaan yang bagus. Oleh sebab itu, ukuran perusahaan dianggap dapat mempengaruhi pengungkapan ERM. Selain itu, pengungkapan tersebut menjadikan informasi yang diberikan diyakini keakuratannya dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada investor. Sejalan dengan *stakeholder theory*, perusahaan mengerti bahwa para *stakeholder*

mengharapkan penyajian pos-pos laporan serinci mungkin. Variabel ini pernah dikaji dalam penelitian Ulfa (2018), Widhiawati & Halmawati (2018), Rifki (2019) yang menyatakan terdapat pengaruh. Namun bertentangan penelitian yang dilakukan oleh Prayoga & Almilia (2013), Pangestuti & Susilowati (2017) ditunjukkan tidak adanya pengaruh terhadap pengungkapan ERM.

Fokus penelitian ini memakai perusahaan terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia (BEI) guna objek penelitian yang menarik untuk dikaji terhadap pengungkapan ERM. Indeks LQ45 merupakan suatu indeks saham dari 45 saham berkategori *liquid*, maksudnya di Bursa Efek Indonesia (BEI) aktif diperdagangkan dan dipilih sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Untuk update terbaru yang masuk kategori LQ45 setiap enam bulan sekali. Ada beberapa alasan yang mendasari pemilihan objek tersebut. Yang pertama, perusahaan yang masuk indeks LQ45 merupakan perusahaan yang mempunyai likuiditas baik, kapitalisasi pasar besar, dan didukung fundamental perusahaan kuat. Yang kedua, dalam indeks LQ45 terdiri dari berbagai perusahaan yang tidak hanya mengacu pada satu sub sektor saja, tetapi lebih variatif. Terakhir, karena berbagai penelitian sebelumnya lebih banyak memakai objek perusahaan keuangan, manufaktur, dan property real estate. Maka, atas hal ini peneliti ingin tau apakah berbagai sub sektor perusahaan yang terindeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia sudah melakukan pengungkapan ERM ataupun sebaliknya.

Periode penelitian ini akan dilakukan selama lima tahun, yakni tahun 2015 sampai 2019. Tahun 2015 dipilih sebagai tahun mulainya pengamatan karena Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2015 menerbitkan regulasi mengenai

penerapan pedoman tata kelola perusahaan terbuka yaitu peraturan nomor 21/POJK.04/2015. Salah satu isinya menginformasikan bahwa perusahaan publik wajib menerapkan pedoman tata kelola, terlebih saat itu sudah menyongsong era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Sejak adanya peraturan tersebut, peneliti menduga bahwa perusahaan indeks LQ45 akan termotivasi untuk menerapkan atas rekomendasi dalam pedoman tata kelola perusahaan secara lebih baik, lebih informatif, dan lebih komprehensif daripada tahun-tahun sebelumnya dengan mengungkapkan ERM, sehingga cocok dijadikan periode penelitian. Tak lain pula, dengan periode selama lima tahun diharapkan bisa memperoleh hasil yang akurat, mewakili kondisi yang sebenarnya dan keterbaruan tahun hasil penelitian yang diamati.

Berdasarkan ketidakkonsistenan antar hasil dari berbagai varians objek penelitian, kemudian dari sisi mengelola risiko dari tradisional menuju manajemen risiko terintegrasi, penelitian ini menggunakan standar ISO 31000: 2009 dalam empat dimensi pengungkapannya. Pembeda dengan standar lain diantaranya lebih luas dan terkonsep. Standar ini dapat diterapkan dalam lingkup organisasi, proyek, maupun unit kerja. Selain itu bisa digunakan dalam industri apapun dan keseluruhan risiko. Tidak heran jika perusahaan di Indonesia, berdasar hasil survei manajemen risiko yang dilakukan CRMS (*Center For Risk Management Studies*) tahun 2016-2018 banyak mengadopsi standar ini. Maka peneliti berusaha untuk mengetahui dewan komisaris independen, komite manajemen risiko, *leverage*, profitabilitas, dan ukuran perusahaan apakah kedudukannya berpengaruh atau tidak mengungkapkan ERM pada perusahaan

terindeks LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2015-2019. Penelitian ini merupakan replikasi penelitian yang dilakukan Gunawan & Zakiyah (2017) dengan menambahkan variabel dewan komisaris independen, komite manajemen risiko, dan profitabilitas yang sebelumnya pernah diteliti Tuti (2015), Riyadi (2018), dan Saskara & Budiasih (2018). Dengan demikian, penelitian ini berjudul **“Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Manajemen Risiko, Leverage, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Enterprise Risk Management* (Studi Pada Perusahaan LQ45 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2019)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang, peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI ?
2. Apakah komite manajemen risiko berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI ?
3. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI ?
4. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI ?

5. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dewan komisaris independen terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
2. Untuk mengetahui pengaruh komite manajemen risiko terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
3. Untuk mengetahui pengaruh *leverage* terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
4. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.
5. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap pengungkapan *Enterprise Risk Management* pada perusahaan indeks LQ45 yang terdaftar di BEI.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat hasil yang diharapkan atas penelitian ini, baik secara teoritis maupun praktis. Diantaranya sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis :

Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini, manfaatnya dapat sebagai salah satu sarana memperluas ilmu pengetahuan mengenai ERM bagi pihak

akademisi dan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji dari sudut pandang teori yang berbeda mengenai pengungkapan ERM.

2. Manfaat praktis :

Hasil yang ditunjukkan dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan perusahaan untuk manage risiko perusahaan baik dari sisi *financial* maupun non *financial* melalui pengelolaan dan pengungkapan ERM. Sedangkan bagi *stakeholder* dapat mempertimbangkan risiko apa saja yang bakal terjadi, dan bagi pemerintah untuk memberikan evaluasi berguna dalam memperbaiki peraturan mengenai pengungkapan ERM.